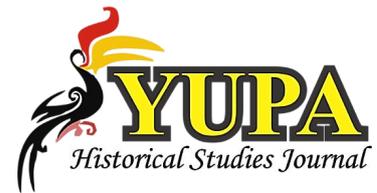


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 5 No. 2, 2021 (91-100)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



HEGEMONI ELIT-ELIT LOKAL DONGGO DALAM MEMBANGUN GERAKAN SOSIAL DI BIMA TAHUN 1972

Subari¹, Anwar²

¹Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

¹subarisejarah@gmail.com, ²anwardonggo8@gmail.com

Received	Accepted	Published
23/05/2021	08/04/2022	10/04/2022

Abstract *This study aims to determine the historical events that occurred in Donggo, Bima Regency in 1972. The method in this research is the historical method using a descriptive qualitative approach. The results showed that the social movement carried out by local elites together with the Donggo traditional community demanded injustice to the government regime of Bima Regency. This social movement was carried out in the form of resistance to the treatment of the Soeharmadji government as a representative of the New Order in Bima by instilling a political system of politics and intimidation of citizens. The resistance became a massive step for the military regime to carry out repressive actions against innocent mobilizers and people.¹*

Keywords: *hegemony, Local Elites, Social Movement*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi di Donggo Kabupaten Bima pada tahun 1972. Metode dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh elit-elit local bersama masyarakat tradisional Donggo menuntut ketidakadilan kepada rezim pemerintahan Kabupaten Bima. Gerakan sosial ini dilakukan dalam bentuk perlawanan terhadap perlakuan pemerintahan Soeharmadji sebagai representasi Orde Baru di Bima dengan menanamkan system politik tataliter dan intimidasi terhadap warga Negara. Perlawanan itu menjadi sebuah langkah massif bagi rezim militer untuk melakukan tindakan represif terhadap tokoh-tokoh penggerak dan masyarakat yang tidak berdosa*

Kata kunci : *Hegemoni, Elit Lokal, Gerakan Sosial*

PENDAHULUAN

Daerah Bima merupakan Kabupaten paling timur di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada awal terbentuknya Kabupaten Bima adalah bekas wilayah kerjaan yang dibangun oleh garis keturunan kesultanan Bima. Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 Muhammad Salahuddin, sistem kesultanan beralih menjadi Daerah Swapraja dan Swatantra, lalu berubah menjadi Daerah Kabupaten. Memasuki era pemerintah kabupaten, Bima dipimpin oleh Letkol Soeharmadji (1967-1974). Dalam periode kekuasaan di masa Orde Baru, Bima didominasi oleh elite militer yang diplot secara sentralistik (Muslimin Hamzah, 2000) .

Pada masa pemerintahannya, Soeharmadji mulai menanamkan kekuasaannya dengan melakukan rekayasa politik sehingga aspirasi politik masyarakat ditentukan oleh penguasa. Sebelum diadakan pemilihan umum tahun 1971, semua kecamatan di Kabupaten Bima diatur sedemikian rupa oleh ABRI guna memenangkan Golkar sebagai penyongkong Orde Baru. Atas dasar perintah rezim, masyarakat diintimidasi dan dipaksa untuk memilih Golkar, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa mengikutinya.

Keterpurukan wajah demokrasi di Bima dipertontonkan di Desa Bajo Kecamatan Donggo (sekarang Soromandi). ABRI melakukan tindakan kekerasan kepada kepala Desa O,o Jamaluddin dan kepala Desa Kala M.Ali Ta,amin lantaran Golkar kalah dalam pemilu di Kecamatan Donggo. Pada masa pemerintahannya sering dilakukan proses pembungkaman aspirasi politik, hal ini menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum yang totaliter. Akibatnya mayoritas masyarakat hanya diakui sebagai obyek dari pembangunan pada masa itu. Para penguasa selalu melakukan politik peminggiran, sehingga aspirasi politik masyarakat ditentukan oleh penguasa yang menjadikan kondisi politik di Bima semakin terpuruk. Selain itu rezim Soeharmadji melakukan eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Bima. Pengiriman kayu jati dari Kecamatan Wera secara besar-besaran ke Jawa dan hilangnya benda-benda pusaka yang disimpan di Musium "ASI Mbojo" berupa keris bersarung emas, dan tombak pusaka milik sultan raib.

Praktek politik yang dimainkan oleh penguasa kemudian mencetuskan reaksi masyarakat Donggo. Nuansa politik yang terkontrol dengan kontestasi dan ketegangan yang demikian gencar melahirkan suatu konflik vertikal dengan penguasa. Masyarakat Donggo yang dijuluki orang gunung ditambah lagi kafir, karena terdapat dua agama besar Kristen dan Islam di wilayah itu, sedang berbenturan dengan rezim yang berkuasa. Stigma negatif yang dilontarkan oleh orang-orang kota tidak menjadikan orang Donggo merasa terhina, justru membuat mereka bangkit untuk melawan ketertindasan.

Sentiment negatif dan politik peminggiran yang dipraktekan oleh orang-orang kota dan pemerintah menjadikan Donggo yang sering bergejolak dari tahun ketahun. Dengan demikian

gambaran ini perlu adanya penataan ulang kehidupan politik, terutama selama rezim Orde Baru yang mengharuskan penduduk memilih satu partai demi tercapainya status quo, adalah mencedarai demokrasi yang dibangun berdasarkan asas Pancasila. Hadirnya Golkar di bumi pertiwi telah menciptakan ketegangan politik bagi elite-elite lokal di Donggo. Benturan sosial masyarakat Donggo dengan rezim yang berkuasa menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan politik bagi masyarakat Bima pada umumnya dan masyarakat Donggo pada khususnya. Pergolakan politik dan perebutan hegemoni di antara elite-elite lokal tidak bisa dihindarkan. Konteks ini menghasilkan kegelisahan sekaligus kearifan komunal yang berujung pada reproduksi konflik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didorong oleh keingintahuan untuk menelusuri suatu peristiwa yang terjadi di Donggo serta gejolak politik di Kabupaten Bima pada masa Orde Baru.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih dan manfaat antara lain: 1). Dapat mempermudah dan memperdalam pemahaman kita terhadap hegemoni elit-elit local tradisional dalam menanamkan pengaruh politik di Bima pada masa Orde Baru, 2), Sebagai wahana pengungkapan suatu makna peristiwa sejarah yang terjadi di daerah terhadap kebijakan rezim Orde Baru, 3), Merangsang dan memupuk tumbuhnya kesadaran sejarah dalam memahami dan menyikapi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bima pada masa Orde Baru, 4), Dapat memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat dan generasi selanjutnya tentang gerakan sosial pada tingkat lokal dan memperkaya khasanah penulisan sejarah nasional, 5) Dapat memberi pemahaman kepada masyarakat dan generasi selanjutnya tentang sosok pejuang daerahnya.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian peristiwa sejarah dengan teknik analisa data bertujuan untuk menguji dan menilai tingkat keabsahan suatu data. Langkah ini dalam metodologi sejarah adalah dimulai dari heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historigrafi.

Heuristic adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Pada tahap ini, teknik pengumpulan data ditempuh dengan dua cara, yaitu, penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Selanjutnya penelitian pustaka dimaksud guna mengumpulkan sumber-sumber berupa buku-buku, tesis, disertasi, artikel dan jurnal yang berkaitan erat dengan kajian yang diteliti.

Kritik adalah tahap dilakukan untuk menguji kebenarannya, keabsahannya apakah sumber yang diperoleh dapat dipercaya atau akurat. Kritik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Menurut Notosusanto (1971:20) bahwa setiap sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek interen. Aspek eksternnya berkaitan dengan persoalan

apakah sumber itu memang betul sumber, artinya sumber otentik yang dibutuhkan oleh penulis. Aspek interennya berpedoman pada persoalan apakah sumber itu dapat dijadikan informasi yang dibutuhkan.

Interpretasi merupakan sebuah tahapan dari metode sejarah berupa kegiatan untuk menafsirkan terhadap fakta sejarah yang sudah diseleksi melalui kritik eksteren dan interen. Interpretasi yang dimaksud adalah memberikan makna dari data yang diperoleh dengan menggunakan data teoritis dan konsep yang digunakan dalam penelitian dan selanjutnya menyusun fakta-fakta yang menjadi sebuah tulisan.

Historiografi merupakan tahap akhir dari sebuah rangkaian penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi sehingga dapat mengisahkan tentang peristiwa secara kronologis dan menghubungkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya hubungan kausalitas. Historiografi menurut Abdullah (1985:15), merupakan puncak dari segalanya, sebab apa yang dituliskan oleh sejarawan itulah sejarah yang *histoire recite*, sejarah sebagaimana yang dikisahkan. Yang mencoba mengungkapkan dan memahami *histoire realite*, sejarah sebagaimana yang terjadi dan hasil penulisan inilah yang disebut historiografi. .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Janji Politik Antara Harapan dan Kenyataan

Harapan akan datangnya sebuah perubahan untuk membangun Donggo yang belum disentuh oleh pembangunan. Pemerintah bersama masyarakat dan mahasiswa melakukan janji politik untuk pemerataan pembangunan fasilitas umum disegala bidang di Kecamatan Donggo. Lobi politik ini tercapai suatu nota kesepakatan untuk mengaspal jalan utama lintas Donggo sebagai arus transportasi untuk menropong kelancaran ekonomi masyarakat.

Melalui Dinas Pertanian, Soeharmadji berjanji akan memberikan bantuan bibit padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Melalui Dinas Perkebunan, pemerintah memberikan bantuan bibit mangga, nangka dan kelapa untuk ditanam disepanjang pantai yang dimulai dari Desa Bajo, Punti, Sowa, Sai dan Desa Sampungu yang memiliki garis pantai di selat Bima. Sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Bima akan memberikan bantuan bibit jati untuk mengadakan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bima membangun tempat ibadah bagi umat Islam di Desa O,o Pusat Kecamatan Donggo (Mustaim, H.Kako, 2013).

Suatu komitmen yang disepakati bersama antara masyarakat Donggo dengan pemerintah Kabupten Bima adalah sebuah janji politik Soeharmadji yang tidak pernah ditepati. Konteks inilah yang menciptakan ketegangan dan gejolak politik bagi kaum tani dengan pemerintahan Kabupaten Bima yang dipelopori oleh lima tokoh antara lain H.Kako, Abdul Majid

Bakri, Abas Oya, M.Ali Ta,amin, dan Djamaluddin H.Yasin. Elite-elite Donggo ini mulai bergerak untuk melawan ketidakadilan pemerintah.

Membangun Opini Publik

Kehidupan masyarakat yang sebelumnya dihantui ketidakjelasan, dengan demikian semakin diperparah oleh rasa kegelisahan yang kian akut. Kehidupan masyarakat bukannya semakin membaik, melainkan justru semakin tertekan dan terperosok ke dalam gejala kemiskinan struktural. Semuanya itu memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat yang sangat mendalam. Akibatnya, pada saat bersamaan masyarakat yang sebagian besar petani tidak bisa memperjuangkan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan melalui pemerintah yang ada. Sehingga persoalan yang muncul mengakibatkan sering terjadinya kekerasan dan pererusakan yang seringkali brutal terhadap simbol-simbol Negara.

Kekecewaan itu lahir akibat pengawasan politik yang kian gencar dilakukan oleh kekuasaan, sehingga merusak tatanan struktur masyarakat tradisional yang pada waktu itu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Selain itu sikap pemerintah yang sering melakukan monopoli kekuasaan untuk memperkaya diri dari pada membangun Bima menjadi wacana yang beredar dikalangan masyarakat. Wacana ini, memicu terganggunya konsentrasi masyarakat yang sering kali melakukan perlawanan terhadap hal yang dianggap mereka tidak adil. Diskursus dan politik pemigiran diwarnai oleh ketidakjelasan itu menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Dengan demikian itu, sehingga muncul ide untuk mengembalikan Bima yang adil dan sejahtera dengan mengangkat Putra Kahir sebagai Bupati Bima.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo-Bima (IPMDB) Dalang Peristiwa

Peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1972 itu mengagetkan Indonesia bagian timur itu dimotori oleh IPMDB yang berkedudukan di ibu kota Jakarta. Menanti nota kesepakatan itu yang tak kunjung datang, tokoh mahasiswa yang bernama Abas Oya, Jamaludin Yasin yang dikenal sebagai aktivis ulung di Jakarta kemudian pulang kampung untuk menyatukan para tokoh. Selanjutnya tokoh agama kharismatik yang bernama Abdul Majid Bakri, M.Ali Ta'amin dan H.Kako Bongko tampil sebagai agitator dengan retorikan sentiment agama untuk membangun semangat masyarakat.

Mosi ketidakpercayaan terhadap pemerintah muncul dikalangan masyarakat akibatnya timbul huruhara dengan semangat perjuangan rakyat yang merasa termarginalkan di Bumi Maja Labo Dahu (malu dan takut) semboyan Kabupaten Bima. Bersama elit-elit tradisional desa, mereka melakukan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa untuk menuntut keadilan yang sama bagi warga Negara. Perlawanan ini dikobarkan dengan semangat kontestasi keagamaan untuk memobilisasi masa.

Dikenal sebagai masyarakat yang paling berani menentang segala sesuatu yang dianggapnya tidak adil merupakan lambang kebanggaan masyarakat Donggo, ditengah julukan

yang diberikan orang-orang di kota sebagai masyarakat terpencil, bodoh dan tertinggal. Oleh sebab itu gerakan sosial masyarakat Donggo tahun 1972 dapat dikatakan peristiwa untuk mengembalikan harga diri dan keberanian masyarakat Donggo di masa lalu, karena hanya orang Donggo yang dianggap bodoh dan tertinggal ini yang berani menentang tindakan sewenang-wenang Soeharmadji. Sedangkan masyarakat lain yang katanya lebih pintar dan lebih maju dari masyarakat Donggo malah jadi pengecut, "dou Donggo dou disa" (orang Donggo itu orang berani), merupakan sumber kebanggaan masyarakat Donggo.

Menggalang Masa dan Jalannya Aksi

Dalam upaya menggalang massa untuk mewujudkan gerakan sosial, masyarakat Donggo pun tidak ada upaya pengorganisasian yang terstruktur untuk menggalang aksi. Mereka hadir antara tahu sama tahu dengan ikatan tradisional yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat Donggo. Proses gerakan masa terdorong oleh rasa kebersamaan yang solid dengan melihat situasi politik semakin genting dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bima memiliki tingkat ketidakpastian yang cacat hukum. Kondisi politik yang kian merosot mendorong masyarakat Donggo untuk melakukan tindakan gerakan sosial kolektif dan tindakan perlawanan terhadap pemerintah untuk berlaku adil dalam perubahan sosial masyarakat. Di bawah pimpinan elit-elit local tradisional Donggo bersama rakyat kecil merumuskan tujuan untuk turun ke jalan guna menuntut janji pemerintah yang belum terealisasi.

Konsentrasi massa sebelum turun ke jalan dikumpulkan di rumah masing-masing para tokoh Donggo, M.Ali Ta,amin di Desa O,o, Djamaluddi H.Yasin di Desa Kalla, Abas Oya di Desa Doridungga sebagai tokoh kunci penggerak masa. Sebelum melakukan long march dilakukan upacara adat berupa penyembelihan kerbau jantan di Desa Kalla sebagai motivasi massa untuk berjuang demi kemajuan kampung halamannya yang belum disentuh oleh pembangunan. Suntikan semangat dan ide-ide yang dilakukan oleh elite-elite telah mengalir dititik nadir masyarakat Donggo berhadapan dengan penguasa yang tidak merakyat (Gajali Ama La Nora, 2017).

Proses penggalangan massa tidak memakan waktu lama. Masa berdatangan dari desa-desa di Kecamatan Donggo, pria, wanita, tua, muda tidak ada yang ketinggalan kecuali satu atau dua orang yang bertugas untuk menjaga kampung. Massa berjalan kaki sambil membawa beberapa poin tuntutan untuk ditunjukkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berisi 1), Mengkritik sistem pemerintah kabupaten Bima yang otoriter diubah menjadi sistem demokrasi, 2), Pemberantasan kedholiman dengan perlakuan ABRI yang sewenang-wenang, 3) Menuntut pemerataan pembangunan di Kabupaten Bima lebih khususnya di Kecamatan Donggo yang dikesampingkan oleh pemerintah.

Massa diperkirakan ribuan orang berjalan kaki sejauh 40 kilometer menuju Kantor Bupati Bima. Elite-elite Donggo mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pengrusakan

yang merugikan orang lain dan harus menjaga kedamaian serta ketertiban. Atas dasar ketidakpastian janji rezim Soeharmadji yang belum terealisasi, lima tokoh mengajak masyarakat Donggo untuk pergi menagih janji dihadapan sang penguasa agar segera membangun infrastruktur dan prasarana umum di Kecamatan Donggo.

Dengan semangat yang bergejolak masyarakat walau nyawa menjadi korban, massa merespon dengan pernyataan sikap bahwa segala bentuk kejahatan dan kezholiman harus dilenyapkan dibumi Maja Labo Dahu (malu dan takut), semboyan Kabupaten Bima. Tepatnya pada pukul 10.00 wita tertanggal 22 juni 1972, massa mulai berdemonstrasi dengan berjalan kaki dari Desa O,o Kecamatan Donggo, melintasi lembah dan gunung menuju Desa Kancoa Rida Kecamatan Bolo, dan melewati jalan poros antarprovinsi menuju Kantor Bupati Bima.

Setelah menempuh perjalanan jauh dengan meneriakkan yel-yel "Suharmadji segera pulang, Suharmadji segera meninggalkan Bima" massa disambut oleh anggota DPRD dan aparat ABRI/Polri di Desa Pandai Kecamatan Woha. Melihat kiri kanan jalan sudah dikepung oleh ABRI/Polri yang membawa senjata laras panjang yang didatangkan dari kekuatan gabungan Kodam IX Udayana Bali untuk menghadang massa. Keadaan tidak kondusif ketika sebagian massa mengamuk untuk mencoba menerobos brikade ABRI/Polri. Namun berkat kegigihan Jamaluddin mengambil alih korlap aksi untuk memberi aba-aba agar tidak terpancing dengan provokator yang hendak merusak aksi damai dan tetap tenang berada pada barisan masing-masing (Gajali Ama La Nora, 2017).

Setelah elit-elit local tradisional Donggo berorasi dan menyampaikan tuntutan dihadapan ABRI dan DPRD, maka berhasil meyeepakati beberapa point. Hasil kesepakatan itu adalah: (1) Anggota dewan mengharapakan demonstran untuk kembali ke Donggo, (2) Isi tuntutan diserahkan ke DPRD dan akan menindaklanjuti ke Bupati. Dan setelah negosiasi sudah dilkakukan, maka terjadilah kesepakatan "Pandai" yang berisi "Unjuk rasa kembali ke Donggo, (3) dalam waktu tiga hari sejak kesepakatan sudah ada jawaban resmi terhadap tuntutan masyarakat Donggo yaitu diterima atau tidak (Gajali Ama La Nora, 2017).

Langkah Represif

Menanti nota kesepakatan yang dibuat oleh DPRD bersama tokoh-tokoh Donggo di Desa Pandai Kecamatan Woha belum terealisasi, masyarakat Donggo tidak melakukan aksi apapun. Sementara aparat TNI/ABRI sudah mulai nampak di Kecamatan Donggo guna mencari tokoh-tokoh Donggo Abas Oya, Jamaluddin, M.Ali Ta'amin, Abdul Majid Bakry dan H.Kako yang berperan aktif dalam unjuk rasa tersebut.

Langkah represif pun dilakukan oleh pemerintah Soeharmadji sebagai perpanjangan tangan Orde Baru dengan menurunkan ABRI ke Donggo. Kondisi sosial masyarakat sudah mulai ketakutan dengan adanya intervensi dan intimidasi aparat yang meneror dan menganiaya masyarakat yang melintas di jalan raya. Beban psikologis memunculkan trauma mendalam bagi

masyarakat yang tidak tahu apa-apa, lantaran tidak memberikan informasi tentang keberadaan tokoh-tokoh yang menjadi target utama aparat TNI/ABRI (Gazali Ama La Nora, Mustahim, 2017).

Operasi penangkapan tokoh-tokoh Donggo dipimpin langsung oleh Pangdam Udayana dengan menyisir diseluruh hutan-hutan di Kecamatan Donggo. Kecamatan Donggo sudah dikuasai penuh oleh aparat TNI/ABRI dengan menggeledah semua rumah-rumah penduduk. Sedangkan harta benda milik warga diambil oleh anggota ABRI, dan bahkan ibu-ibu, gadis tidak luput dari pelecehan seksual oleh oknum ABRI. Dalilnya operasi ini dilakukan guna mencari tempat-tempat persembunyian aktor-aktor penggerak masa yang belum tertangkap.

Setelah Kecamatan Donggo dikepung oleh TNI/Polri, akhirnya actor penggerak dalam menyetir gerakan masa berhasil ditangkap. Melalui operasi itu, TNI/Polri berhasil menangkap Abas Oya di Dusun Nandongere Desa Bajo sebagai tokoh kunci penggerak. Beliau ditahan dan disiksa dengan tanganya diborgol di Koramil (Komando Rayon Militer) di Desa Bajo untuk sementara waktu menanti teman-temannya yang belum ditangkap. Selanjutnya mendengar informasi bahwa Abas Oya telah ditahan dan disiksa, Jamaludin Yasin dan M.Ali Ta'amin bereaksi cepat dengan menggalang masa dengan titik kumpul di Desa O,o. Dibawah kendali dua tokoh itu dan berhasil mengumpulkan masa dari berbagai desa, mereka berjalan kaki menuju Desa Bajo menuntut untuk segera melepas Abas Oya.

Satu kilometer sebelum sampai di Desa Bajo, masa ditahan oleh TNI/Polri dengan senjata laras panjang dan meminta perwakilan untuk menyampaikan tuntutan. TNI/Polri meminta Jamaludin Yasin dan M.ali Ta'amin sebagai utusan dan menghimbau kepada masa untuk kembali pulang di rumah masing-masing. Tiga tokoh itu berhasil di tangkap dengan hasil tipu daya untuk mengelabui tokoh Donggo, sedangkan dua tokoh agama khasrismatik sekaligus tokoh mistik Abdul Majid Bakri dan H.Kako Bongko masih terisolasi dibelantaran hutan. Dua tokoh itu tidak berani keluar ditambah lagi dengan dentuman senjata dan mortir untuk menakut-nakuti warga.

Sepandai-pandainya tupai meloncot tetap jatuh juga, itulah kata pepatah. Sepintar-pintarnya Abdul Majid Bakry dan H.Kako Bongko bersembunyi akhirnya ketahuan juga. Berakhirnya drama petulangan dua tokoh mistik ini, berawal dari ketiga orang keluarga dekatnya yang bernama Kaharuddin Usman dan M.Saleh Bakry dan Zainuddin Ismail. Ketiganya mendatangi untuk membujuknya agar mau menyerahkan diri, mereka bercerita bahwa teman-temannya Abas Oya, Jamaluddin, dan M.ali Ta,amin sudah ditangkap (Gazali Ama La Nora, 2008).

Lengkap sudah penangkapan aktor-aktor dibalik peristiwa 1972 yang mengganggu stabilitas politik rezim Soeharmadji. Tokoh-tokoh Donggo berhasil ditangkap, dibuat tidak berdaya, langkah represif pun dilakukan, masyarakat tidak bisa berkutik lagi. Masyarakat

Donggo yang menuntut untuk adanya keadilan di segala bidang, dianggap sebagai sebuah upaya pemberontakan.

Pembungkaman Para Tokoh

Cara-cara agitasi mental, teror fisik selalu dimainkan oleh ABRI dan tentu sudah menjadi konsep baku Orde Baru untuk membungkam suara rakyat yang dianggap melakukan makar. Maklum masa-masa tersebut Orde Baru dengan Dwifungsi ABRI-nya menjadi “momok” yang sangat menakutkan oleh semua pihak. Kelima tokoh Donggo tersebut ditahan dengan tuduhan melawan pemerintah yang sah. Operasi pembungkaman yang dilakukan oleh ABRI menjadi sebuah langkah dan strategi jitu pemerintahan Soeharmadji. Dengan labelisasi ekstrimis kiri, dan subversif melawan pemerintah, para aktor penggerak diadili dan dihukum dengan pengadilan semu yang diproses hanya berdasarkan intervensi penguasa.

Pada tahun 1973 tokoh-tokoh Peristiwa Donggo disidangkan di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan tuduhan melanggar UU Subversif pasal 1 Penpres No. 11, pasal 108, jo 64 KUHP, jo pasal 160 KUHP, jo pasal 14 UU nomor 1/1963 dan Penpres nomor 5/1963, dengan ancaman hukuman mati. Sidang demi sidang dilalui, maka tokoh-tokoh Donggo diputuskan bersalah, karena membawa senjata tajam berupa keris, golok, parang, tombak dan lain-lain yang secara hukum tidak dibenarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan social yang dilakukan oleh elit-elit local bersama masyarakat tradisional Donggo dilatarbelakangi oleh sebuah komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat untuk pemerataan pembangunan di Kecamatan Donggo tidak pernah di tepati. Menanti nota kesepakatan yang tak kunjung datang, elit-elit local mengambil tindakan dengan mendesak Soeharmadji selaku Bupati Bima agar segera menepati janjinya. Bersama masyarakat tradisional yang merasa dizoalimi dan demi “Ladjna Amar Makruf Nahir Mungkar” lima tokoh Donggo dibawa kendali Abas Oya, Jamaludin Yasin, M.Ali Ta’amin, Abdul Madji Bakri dan H.Kako Bongko mendesain gerakan sosial dengan berjalan kaki sejauh 40 km menuju Kantor Bupati Bima untuk menagih janjinya. Merancang gerakan social yang dibangun itu menjelma menjadi tindakan represif oleh junta militer untuk membungkam actor penggerak di balik peristiwa tahun 1972 kala itu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih kepada (LRPM-UTS) Lembaga Riset dan Penjaminan Mutu Universitas Teknologi Sumbawa yang mensupport

dan mendanai penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang di rencanakan.

REFERENSI

- A. Wahab, M. Nur. 1982. Mengenal Masyarakat Donggo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima
- Budiman, Arief, 1999. Pergolakan Melawan Kekuasaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali A.Nora, 2008, Outobiografi Mutiara Donggo. NCI Press, Jakarta Barat.
- Ghazali A.Nora, H.Mustaim, 2017. Peristiwa Donggo: Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru. Mataram: PT. Suara Niaga Nusantara (Lombok Post Group).
- Gottschalk, Louis. 1995. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press
- Harahap, M.E, 2001. Demokrasi Dalam Cengkraman Orde baru. Jakarta: Tawas Orba.
- Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manalu, Dimpos. 2009. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjad Mada Universitas Press.
- Mustahid H. Kako,. 2013. Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan dan Hukuman Semasa Orde Baru. Mataram: Lombok Post.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma - norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah. Jakarta: Dephankam.
- Rangga. R, 2011. Gerakan Sosial Masyarakat Donggo 1972: Kisah Elit-elit yang Terkalahkan. Skripsi: Universitas Negeri Malang
- Sjamsudin, Helius. 2012. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yusron, 2009. Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di tengah Demokratisasi. Jakarta: LP3ES. .